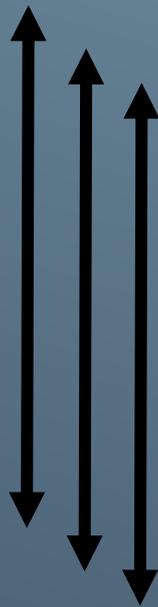




BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2025



**KANTOR KECAMATAN KURAU
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
 23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
 24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
 25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA - SKPD) pada Kantor Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Perubahan RENJA-SKPD dibuat dalam rangka penyesuaian program kerja dan kegiatan serta pergeseran pagu antar program dan kegiatan pada tahun 2025 yang nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam Kebijakan Umum Anggaran / Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) sebagai dasar penyusunan Perubahan RKA-SKPD. Selanjutnya setelah Perubahan RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan Perubahan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam dokumen perencanaan Perubahan RENJA-SKPD Tahun 2025 tidak saja memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan dan kegiatan tahun yang akan datang. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam RENSTRA-SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Kami sadari Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 Kantor Kecamatan Kurau ini belum sempurna, masih banyak yang perlu disempurnakan, koreksi dan perbaikan, agar Perubahan Rencana Kerja SKPD ini lebih baik sangat kami harapkan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada semua pihak yang membantu dalam proses pembuatan Renja ini kami ucapkan terima kasih.

Kurau, Juni 2025

Pt. Camat Kurau,



FIRMANSYAH, S.STP, MM

NIP. 19741105 199403 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
2.1 Landasan Hukum.....	2
3.1 Maksud dan Tujuan.....	4
4.1 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Kurau	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kurau	19
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kurau	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kurau	36
3.3 Program dan Kegiatan	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
BAB V PENUTUP	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Kurau dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

PERUBAHAN RENJA SKPD Kecamatan Kurau Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kurau untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 dari 11 desa. Adapun keberhasilan dan tidaknya PERUBAHAN RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

PERUBAHAN RENJA - SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategi (RENSTRA - SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan RENSTRA - SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapannya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana



PERUBAHAN RENJA - SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari RENJA - SKPD, RENSTRA - SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam RENSTRA - SKPD maupun dalam RPJMD.

Penyusunan PERUBAHAN RENJA - SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam Kebijakan Umum Anggaran / Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) sebagai dasar nantinya penyusunan Perubahan RKA - SKPD. Selanjutnya setelah Perubahan RKA - SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA-P SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan PERUBAHAN RENJA - SKPD Kantor Kecamatan Kurau Tahun 2025 dilandasi oleh :

1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4663);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan



- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
 13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 27);
 14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabuapten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 64).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya PERUBAHAN RENJA - SKPD Kantor Kecamatan Kurau Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah yang jelas berupa Program dan Kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2025. Berdasarkan PERUBAHAN RENJA - SKPD Kantor Kecamatan Kurau inilah



maka nantinya akan diformulasikan dalam APBD Kabupaten Tanah laut melalui mekanisme yang berlaku.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau untuk memberikan arahan sekaligus pedoman bagi unit kerja dalam lingkup Kecamatan Kurau dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan target kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Kurau Tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan Perubahan RENJA SKPD Kecamatan Kurau inilah maka nantinya akan diformulasikan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut melalui mekanisme yang berlaku.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika yang ditulis adalah menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kurau Tahun 2025, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Kurau Tahun lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Kurau
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan

Kurau

Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2024 sampai dengan tahun akhir tahun 2024 berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kurau berjalan sebagaimana yang diharapkan artinya tepat sasaran, sedangkan untuk tahun berjalan tahun 2025 sampai dengan waktu disusunnya Renja Perubahan ini atau tepatnya sampai Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dalam realisasinya mencapai 14,67% dari total anggaran setelah adanya efisiensi Rp. 3.835.350.157. Dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan tentu tidak terlepas dari permasalahan – permasalahan yang dihadapi yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dan regulasi yang mewajibkan capaian pertriwulan sehingga mempersulit pencapaian tersebut.

Dalam dokumen Renja awal Kecamatan Kurau Tahun Anggaran 2025 yaitu memuat program sebanyak 6 program, 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan, sesuai yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 Kecamatan Kurau, maka Kecamatan Kurau dalam Upaya menjalankan renstra tersebut selama 3 tahun, pada tahun 2025 merupakan tahun ke 2 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 Kecamatan Kurau.

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Kurau Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi
- b. Tujuan yang dikehendaki
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya sampai dengan akhir masa Renstra 2024 – 2026
- d. Kebijakan-lebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana



e. Penyerderhanaan program dan kegiatan

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Kurau Tahun 2025 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2025 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan Tahun 2025
- b. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi Pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kurau Tahun 2024 sampai akhir bulan Desember, dari sisi keuangan sudah tercapai yaitu 87, 89%. Untuk Tahun 2024 program/kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah 100% yaitu

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
Pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya hanya mencapai 10,98% dikarenakan capaian kinerja unit yg dipelihara sesuai kebutuhan saja.
 2. Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
Pada sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa tidak ada realisasi dikarenakan desa tidak ada yang mau ditunjuk sebagai perwakilan Kecamatan untuk ikut lomba desa di kabupaten.
Adapun realisasi program/kegiatan Tahun 2024 yang lainnya capaian fisiknya memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Realisasi capaian kinerja Tahun 2024 pada saat penyusunan renja adalah sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; capaian realisasi keuangan 86,21%



2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; capaian realisasi keuangan 81,78%
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; capaian realisasi keuangan 96,50%
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; capaian realisasi keuangan 96,50
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; capaian realisasi keuangan 96,67%
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; capaian realisasi keuangan 62,40%



**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2024
KABUPATEN TANAH LAUT**

Nama Perangkat Daerah :

Kecamatan Kurau

Lembar :

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Prakiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 =(10/4)
7										
	UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01									
	KECAMATAN									
7	01	01								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	100	100	100	100%	100	100	100%



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan yang tersusun (Persentase)	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
7	01	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penunjang layanan publik dan urusan pemerintahan (persentase)	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang / bulan	15 Orang / bulan	13 Orang / bulan	13 Orang / bulan	100%	15 Orang / bulan	15 Orang / bulan	100%
7	01	01	2.02	04	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya penunjang layanan administrasi kepegawaian (Persentase)	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	01	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13 paket	13 paket				13 paket	13 paket	100%



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya penunjang layanan administrasi umum (Persentase)	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 paket	2 paket	100%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41 paket	41 paket	6 Paket	6 Paket	100%	41 paket	41 paket	100%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 paket	17 paket	2 Paket	2 Paket	100%	17 paket	17 paket	100%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	1 Paket	1 Paket	100%	3 paket	3 paket	100%
7	01	01	2.06	08	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215 Laporan	215 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	215 Laporan	215 Laporan	100%
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 dokumen	3 dokumen				3 dokumen	3 dokumen	100%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya penunjang layanan pengadaan barang milik daerah (Persentase)	100	100	100	100	100%	100	100	100%



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

7	01	01	2.07		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	4 unit	2 Unit	2 Unit	100%	4 unit	4 unit	100%
7	01	01	2.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlag paket pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	5 Unit	5 Unit	100%	1 unit	1 unit	100%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan umum (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100	100
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	6 Orang	6 Orang	100%	12 laporan	12 laporan	100%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Persentase)	100	100	100	100	100%	100	100	100%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun 2025

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	100%	11 unit	11 unit	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 unit	31 unit	33 unit	33 unit	100%	31 unit	31 unit	100%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan (Nilai)	100	100	100	100	100%	100	100	100%
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	2 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IKM Kecamatan (Nilai)	100	100	100	100	100%	100	100	100%
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase capaian koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100%	100	100	100%
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	IKM Kecamatan (Nilai)	100	100	100	100	100%	100	100	100%
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100%	100	100	100%
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	IKM Kecamatan (Nilai)	100	100	100	100	100%	100	100	100%



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase capaian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100%
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19 Orang	19 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	19 Orang	19 Orang	100%
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	484 Orang	484 Orang	410 Orang	410 Orang	100%	484 Orang	484 Orang	100%



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

					Lokal, Regional, dan Nasional									
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	IKM Kecamatan (Nilai)	100	100	100	100	100%	100	100	100%
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase capaian fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100%	100	100	100%
					Fasilitasi Admintrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	11 Dokumen	11 Dokumen	100%



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
--	--	--	--	--	---	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kurau

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kurau yang mengacu pada visi misi Kabupaten Tanah Laut serta rencana strategis Kecamatan Kurau, maka dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lingkup SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan bagi kepentingan perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kurau.

Kecamatan Kurau dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 27). Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Standar Pelayanan yang merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi layanan dan atau penerima layanan.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Kurau salah satu tolak ukur adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 berupa survei dengan responden sebanyak 600 responden dan mencapai nilai sebesar 88,22% hal ini menunjukkan kenaikan nilai IKM dari tahun lalu. Pencapaian kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan Kurau terdapat pada :



TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KURAU
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Uraian Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kurau	Nilai			90,3	90,5	90,7	88,16	86,34	88,22	*)	
2	Nilai Sakip Kecamatan Kurau	Nilai			82	83	83	72,5	62	68,3	*)	



2.3 Isu -Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kurau

Ada beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kurau sebagai berikut :

1. Lemahnya integritas profesionalisme aparatur.
2. Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
3. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat sekitar
4. Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang dilimpahkan/diberikan.
5. Birokrasi yang belum efektif dan efisien.
6. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pemuda usia sekolah.
7. Memberikan fasilitasi kemudahan bagi kepentingan UKM
8. Keterbatasan pelaksana teknis terhadap pelayanan
9. Pengawasan perizinan yang belum optimal.

Ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Kurau adalah :

- a. Sumber Daya Manusia Aparatur
 - Kriteria kelayakan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
 - Jumlah Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
 - Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur tentang dilibatkan dalam diklat teknis.
- b. Sarana dan Prasarana
 - Mengembangkan Teknologi Informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam Upaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat.
 - Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.



- Daftar kekurangan kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan dan optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang Kantor Kecamatan Kurau.



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

TABEL T-C 3.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi Detil	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi Detil	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)			(09)	(10)
UNSUR KEWILAYAHAN										
	KECAMATAN				3.948.702.253					3.948.702.253
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Kurau	91 Nilai	3.016.054.797	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Kurau	91 Nilai	3.016.054.797
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5.857.231	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5.857.231



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kurau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	4.024.883	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kurau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	4.024.883
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kurau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	1.832.348	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kurau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	1.832.348
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.453.485.615	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.453.485.615
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kurau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	2.452.317.913	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kurau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	2.452.317.913
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kurau	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	1.167.702	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kurau	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	1.167.702
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	5.439.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	5.439.000



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun 2025

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kecamatan Kurau	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 paket	5.439.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kecamatan Kurau	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 paket	5.439.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	237.798.463	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	237.798.463
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kurau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	810.218	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kurau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	810.218
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kurau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	48.418.630	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kurau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	48.418.630
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kurau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	9.623.920	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kurau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	9.623.920
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kurau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	13.011.895	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kurau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	13.011.895



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun 2025

	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Kurau	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	15.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Kurau	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	15.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kurau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	150.933.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kurau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	150.933.800
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Kurau	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0					
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kurau	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%						
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Kurau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit						
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	199.954.488	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	199.954.488



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun 2025

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kurau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	44.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kurau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	44.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kurau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	155.554.488	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kurau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	155.554.488
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	113.520.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	113.520.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kurau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	37.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kurau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	37.500.000



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun 2025

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kurau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	61.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kurau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	61.500.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kurau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	14.520.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kurau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	14.520.000
2	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Meningkatnya kepuasan masyarakat dlm memperoleh layanan pada kecamatan Kurau	90,5	5.026.335	PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Meningkatnya kepuasan masyarakat dlm memperoleh layanan pada kecamatan Kurau	90,5	5.026.335
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	5.026.335	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	5.026.335



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun 2025

	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kurau	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	5.026.335	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kurau	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	5.026.335
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Meningkatnya kepuasan masyarakat dlm memperoleh layanan pada kecamatan Kurau	90,5	16.990.000			Meningkatnya kepuasan masyarakat dlm memperoleh layanan pada kecamatan Kurau	90,5	16.990.000
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	16.990.000			Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	16.990.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kurau	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	16.990.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kurau	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	16.990.000



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun 2025

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Meningkatnya kepuasan masyarakat dlm memperoleh layanan pada kecamatan Kurau	90,5	1.759.528.814			Meningkatnya kepuasan masyarakat dlm memperoleh layanan pada kecamatan Kurau	90,5	Rp 1.759.528.814
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	1.759.528.814			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	1.759.528.814
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan						



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun 2025

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Meningkatnya kepuasan masyarakat dlm memperoleh layanan pada kecamatan Kurau	90,5	879.764.407			Meningkatnya kepuasan masyarakat dlm memperoleh layanan pada kecamatan Kurau	90,5	Rp 879.764.407
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	879.764.407			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	879.764.407
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Kecamatan Kurau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	24 orang	99.901.771	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Kecamatan Kurau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	24 orang	99.901.771



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

Indonesia		Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kecamatan Kurau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	410 orang	742.841.636	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kecamatan Kurau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	410 orang	742.841.636
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Kurau	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 dokumen	37.021.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Kurau	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 dokumen	37.021.000



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Meningkatnya kepuasan masyarakat dlm memperoleh layanan pada kecamatan Kurau	90,5	30.866.714	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Meningkatnya kepuasan masyarakat dlm memperoleh layanan pada kecamatan Kurau	90,5	Rp 30.866.714
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	30.866.714	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	30.866.714
	Fasilitasi Admintrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kurau	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	4.867.960	Fasilitasi Admintrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kurau	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	4.867.960
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Kecamatan Kurau	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	22 dokumen	14.999.365	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Kecamatan Kurau	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	22 dokumen	14.999.365



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Kurau	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 dokumen	10.999.389	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Kurau	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 dokumen	10.999.389	
TOTAL					3.948.702.253						3.948.702.253



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan dilakukan terhadap program dan kegiatan yang dilakukan untuk Renstra Perangkat daerah Kecamatan Kurau Tahun 2024-2026, yang berisi perencanaan program/kegiatan selama 3 (tiga) tahun, direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam penelaahan urusan program dan kegiatan perlu proses dan dilakukan dengan meminta masukan dari Camat, Sekretaris Camat, Kasubbag, Kasi dan Staf dengan mengedepankan keperluan dan skala prioritas, baik keperluan administrasi kantor, maupun kebutuhan aparat Kecamatan yang mendesak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Adapun untuk usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan yang bersumber non APBD Kabupaten Tahun 2025 tidak ada.

TABEL 4.2
USULAN PEKERJAAN YANG BERSUMBER NON APBD KABUPATEN
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	Pekerjaan	Lokasi	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Sumber Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NIHIL						



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja, tidak terlepas dari Kebijakan nasional. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas Pembangunan Nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berorientasikan melalui pencapaian strategi Pembangunan serta pengembangan program percepatan pengurangan kemiskinan.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (UU No 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan Pembangunan ekonomi. Disamping itu hasil-hasil pembanguna harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kurau

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Kurau Tahun 2025 adalah :

1. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan secara optimal dalam rangka melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kecamatan Kurau untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan yang diharapkan.



2. Efektivitas dan produktivitas kerja, keterampilan serta pengetahuan yang menunjang kerja aparat Kecamatan.
3. Peningkatan pemberdayaan Masyarakat di desa.
4. Peningkatan kinerja, kualitas dan pengetahuan aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Terciptanya rasa solidaritas dan ikatan sosial antara pemerintah dengan Masyarakat.
6. Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam bentuk bernegara, pemerintahan dan bermasyarakat.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Kurau Tahun 2025 adalah :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tertib administrasi pemerintahan Kecamatan, berupa pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan administrasi keuangan.
3. Pelayanan publik bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pelayanan publik bidang kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pelayanan publik bidang pemberdayaan Masyarakat desa sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Pelayanan publik bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Pelayanan publik bidang pelayanan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku.

3.3 Program dan Kegiatan



TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SKPD TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050-3708	Lokasi Detil	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(09)	(10)		
7				UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01			KECAMATAN					5.180.584.000		
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatnya kinerja tata kelola kecamatan Kurau yang akuntabel			4.385.584.000		
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	Baik	5.857.231	APBD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kurau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	6 dokumen	4.024.883	APBD	6 dokumen 5.000.000



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun 2025

							Daerah						
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kurau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	1.832.348	APBD		2 laporan	5.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	Baik	2.453.485.615	APBD		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.610.000.000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kurau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	2.452.317.913	APBD		15 orang/bulan	3.600.000.000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kurau	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	1.167.702	APBD		12 dokumen	10.000.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	Baik	5.439.000	APBD		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Kecamatan Kurau	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 paket	5.439.000	APBD		15 paket	10.000.000



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	Baik	237.798.463	APBD		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.000.000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kurau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	810.218	APBD		1 paket	5.000.000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kurau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	48.418.630	APBD		5 paket	115.000.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kurau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	9.623.920	APBD		2 paket	20.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kurau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	13.011.895	APBD		2 paket	20.000.000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Kurau	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	15.000.000	APBD		3 paket	10.000.000



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun 2025

7	01	01	2.06	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kurau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	150.933.800	APBD		250 laporan	250.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP	Baik	199.954.488	APBD		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.584.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kurau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	44.400.000	APBD		12 laporan	55.000.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kurau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	155.554.488	APBD		12 laporan	160.584.000



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP	Baik	113.520.000	APBD		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.000.000
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kurau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	37.500.000	APBD		1 unit	35.000.000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kurau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	61.500.000	APBD		11 unit	55.000.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kurau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	14.520.000	APBD		33 unit	30.000.000



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun 2025

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Meningkatnya kepuasan masyarakat dlm memperoleh layanan pada kecamatan Kurau		5.026.335				50.000.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		IKM	Baik	5.026.335	APBD		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	50.000.000
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kurau	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	5.026.335	APBD		2 laporan	50.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Meningkatnya kepuasan masyarakat dlm memperoleh		16.990.000				75.000.000



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun 2025

							layanan pada kecamatan Kurau						
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		IKM	Baik	16.990.000	APBD		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kurau	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	16.990.000	APBD		1 laporan	75.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Meningkatnya kepuasan masyarakat dlm memperoleh layanan pada kecamatan Kurau		879.764.407				Rp 520.000.000



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun 2025

7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		IKM	Baik	879.764.407	APBD		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	520.000.000
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Kurau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	24 orang	99.901.771	APBD		38 orang	100.000.000



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun 2025

						Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kecamatan Kurau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	410 orang	742.841.636	APBD		410 orang	350.000.000



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun 2025

							Nasional						
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Kurau	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 dokumen	37.021.000	APBD		8 dokumen	70.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Meningkatnya kepuasan masyarakat dlm memperoleh layanan pada kecamatan Kurau		30.866.714				Rp 150.000.000



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun 2025

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		IKM	Baik	30.866.714	APBD		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	150.000.000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Admintrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kurau	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	4.867.960	APBD		1 dokumen	50.000.000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Kurau	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 dokumen	14.999.365	APBD		22 dokumen	50.000.000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Kurau	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	2 dokumen	10.999.389	APBD		2 dokumen	50.000.000



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

						Daerah dengan Pembangunan Desa							
TOTAL								3.948.702.253		TOTAL		5.180.584.000	



BAB IV

RENCANA KERJA AWAL DNA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra PD 2024 – 2026 namun RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2024-2026 ditetapkan mengacu pada pasal 147 ayat 2 Permendagri tersebut bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi.

Adapun rencana program dan kegiatan sesuai dengan Kepmendagri 50 Tahun 2021 yang nantinya akan dilaksanakan Kecamatan Kurau Tahun 2025 ada 5 program, 10 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.948.702.253,20. Namun pagu tersebut mengalami efisiensi sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah sehingga pagu Tahun 2025 setelah efisiensi menjadi Rp. 3.773.747.448,20 serta akan dilakukan perubahan seperti pada tabel berikut:



**REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
KANTOR KECAMATAN KURAU**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET MURNI 2025	REALISASI TW 1	TARGET PERUBAHAN 2025	PAGU 2025 (RP)	PAGU PERGESERAN TERAKHIR 2025	REALISASI PAGU 2025 (RP)	RENCANA PERGESERAN/ PENAMBAHAN (RP)	SELISIH RP (+/-)	KETERANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.016.054.797,00	2.940.497.725,00	675.693.450,00	2.973.982.230,15	165.980.663,15	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	7	0	-	4.024.883,00	3.410.918,00	-	4.024.883,00	613.965,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	0	-	1.832.348,00	826.538,00	-	-	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlahn orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15	14	15	2.452.317.913,00	2.452.317.913,00	531.822.334,00	2.491.316.027,00	-	



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	0	-	1.167.702,00	798.954,00	-	-	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	14	0	-	5.439.000,00	-	-	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah										
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	0	-	810.218,00	810.218,00	-	-	-	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	20	43	48.418.630,00	39.421.214,00	25.965.000,00	67.187.819,00	27.766.605,00	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2	8	19	9.623.920,00	9.623.920,00	1.786.000,00	17.713.039,70	8.089.119,70	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1	2	-	13.011.895,00	11.426.562,00	150.000,00	-	-	



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

	yang disediakan									
Penyediaan bahan material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	3	0		15.000.000,00	15.000.000,00	-	24.073.467,45	9.073.467,45	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	250	106	215	150.933.800,00	93.675.000,00	35.203.600,00	183.675.000,00	90.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	0	0	-	-	-	-	30.437.506,00	30.437.506,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	3	12	44.400.000,00	44.400.000,00	12.889.535,00	-	-	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	3	-	155.554.488,00	155.266.488,00	48.822.352,00	155.554.488,00	-	



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

	yang disediakan									
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	1	-	37.500.000,00	37.500.000,00	2.370.000,00	-	-	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9	5	-	61.500.000,00	61.500.000,00	15.684.629,00	-	-	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23	0	34	14.520.000,00	14.520.000,00	1.000.000,00	-	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5.026.335,00	4.180.000,00	-	5.026.335,00	846.335,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan										



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat daerah Yang Ada di Kecamatan										
Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	2	0	-	5.026.335,00	4.180.000,00	-	5.026.335,00	846.335,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					16.990.000,00	12.490.000,00	-	17.500.000,00	5.010.000,00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	0	-	16.990.000,00	12.490.000,00	-	17.500.000,00	5.010.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					879.764.407,00	819.089.009,00	24.500.000,00	939.708.891,48	120.619.882,48	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai										



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

Pengawasan Kepala Daerah										
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Republik Indonesia	24	0	-	99.901.771,00	74.747.373,00	-	99.157.771,20	24.410.398,20	



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	410	150	-	742.841.636,00	723.941.636,00	24.500.000,00	820.151.120,28	96.209.484,28	
Pelaksanaan tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8	0	8	37.021.000,00	20.400.000,00	-	20.400.000,00	-	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					30.866.714,00	19.807.189,00	6.187.608,00	14.882.800,00	6.075.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa										
Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	1	0	-	4.867.960,00	-	-	-	-	



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kurau Tahun
2025

Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	22	0	-	14.999.365,00	8.807.800,00	-	14.882.800,00	6.075.000,00	
Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2	2	-	10.999.389,00	10.999.389,00	6.187.608,00	-	-	
TOTAL					3.948.702.253,00	3.796.063.923,00	706.381.058,00	3.951.100.256,63	298.531.880,63	



BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA - SKPD) Kecamatan Kurau Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategi (RENSTRA – SKPD) Kecamatan Kurau Tahun 2025 – 2029 dalam rangka pencapaian target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

PERUBAHAN RENJA - SKPD Kecamatan Kurau merupakan lanjutan dari Rencana Kerja Tahun 2025 yang sudah berjalan sampai dengan Triwulan II yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Pada akhirnya Rencana Kerja Perubahan ini merupakan tolok ukur dalam menilai suatu keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja yang akan ditetapkan

Dengan adanya PERUBAHAN RENJA - SKPD Kecamatan Kurau, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya pejabaran dari Visi dan Misi Instansi diharapkan akan lebih jelas, terkoordinasi, serta berkelanjutan dengan SKPD yang terkait.

Kurau, Juni 2025

Pt. Camat Kurau,



FIRMANSYAH, S.STP, MM

NIP. 19741105 199403 1 006